

INDONESIA DALAM DUA ORDE: SEBUAH CITRA YANG RETAK *

Acep Iwan Saidi **

Abstract

The unevenly distributed development can trigger a social and political conflict in local areas. The development that always supported the capitalists also created a gap, the corruption among the officials could never stop. The reformation that initially gave a hope to the people, yet it never comes true. The obvious success of reformation is only the freedom to talk, to gather, and to ally. However, the success has become a boomerang. This results in the pessimism among the intellectuals that reflects in some books. The situation has been worst by some natural disasters.

Some people assume that it is closely related to the human behaviour. Both positive and negative political and social situation are unable to detach from the effect in global level, self-image, and mentality.

Pengantar

Sebagaimana telah menjadi pengetahuan umum di Indonesia, masa orde baru yang dipimpin Soeharto selama 32 tahun merupakan masa yang melelahkan karena kepemimpinan yang militeristik dan represif. Harus diakui bahwa beberapa pencapaian, terutama di bidang ekonomi, memang diraih¹. Akan tetapi, pencapaian itu sangat tidak merata. Jakarta dan Jawa memang bisa dikatakan menikmati hasil pembangunan tersebut, tetapi daerah-daerah lain di luar itu tidaklah

demikian. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu pemicu terjadinya kecemburuan dan konflik sosial-politik di daerah-daerah di luar Jawa. Selain itu, pembangunan yang terlalu berpihak pada pemilik modal (kapitalistik) juga menimbulkan kesenjangan yang sangat jauh antara si kaya dan si miskin. Korupsi di kalangan pejabat tinggi dan keluarga Cendana pun merajalela.

Turunnya Soeharto dan selesainya masa orde baru digantikan orde reformasi ternyata tidak membawa perubahan berarti. Indonesia sebagai sebuah bangsa malah semakin terpuruk. *Indonesia: Tanda Yang Retak*, demikian sebuah judul buku yang ditulis beberapa orang sarjana dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Buku ini terbit tahun 2002, kurang-lebih empat tahun setelah Soeharto lengser dari kursi kekuasaannya sebagai presiden yang memerintah lebih dari tiga dasawarsa tersebut.

* *Tulisan ini disarikan dari Bab III disertasi penulis di Program Pascasarjana SRD ITB. Disertasinya sendiri bertajuk "Narasi Simbolik dalam Seni Rupa Kontemporer Indonesia". Bab III merupakan uraian tentang situasi Indonesia tempat para seniman kontemporer Indonesia lahir, besar, dan berkarya.*

** *Acep Iwan Saidi, Kepala Perpustakaan FSRD ITB, dosen pada KK Ilmu-Ilmu Desain dan Budaya Visual.*

¹ Salah satu keberhasilan Soeharto dalam Pembangunan ekonomi adalah penyusunan skala prioritas melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA).

Semula, turunnya Presiden Soeharto dinilai berbagai pihak, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional sebagai kemenangan demokrasi dan rakyat. Peristiwa tersebut, yang menandai dimulainya reformasi, memberikan banyak harapan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk sebuah situasi yang lebih tentram, damai dan sejahtera, dalam arti terlepas dari pemerintahan militeristik yang otoriter dan korup. Akan tetapi, harapan itu rupanya tidak pernah tercapai. Dalam perkembangannya, kenyataan menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat tidak mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, nyaris pada seluruh sektor. Satu-satunya keberhasilan reformasi yang terasa adalah kebebasan berbicara, berkumpul, dan berserikat. Keberhasilan ini pun dalam beberapa hal juga menjadi bumerang. Bebasnya berbicara menyebabkan berbagai informasi menjadi simpang-siur sebab setiap orang bisa berbicara tentang apa saja, bahkan untuk hal-hal yang tidak dikuasainya. Para politikus berbicara soal krisis moneter, para ekonom menganalisis masalah-masalah politik, para ustad berdebat masalah negara, dan seterusnya. Partai politik pun berdiri seperti jamur di musim semi. Di sisi lain, media massa semakin memiliki kebebasan seakan tanpa batas. Televisi bisa setiap hari menyiarkan acara-acara berbau pornografi, kriminal, takhayul, dan lain-lain.

Situasi semacam itu terus berlangsung hingga kini, hampir satu dasawarsa setelah reformasi bergulir. Sepanjang kurang lebih 10 tahun perjalanan reformasi, Indonesia malah

semakin menjadi tanda yang semakin retak. Banyak sarjana, intelektual, dan para cendekia menunjukkan kepesimisan akan bangkitnya negeri ini ke arah kehidupan yang lebih baik. Kepesimisan itu bisa dibaca dari banyak buku yang terbit dengan nada demikian. Selain *Indonesia: Tanda Yang Retak*, sederet buku lain yang sejenis bisa ditemukan di berbagai toko buku, seperti *Bangsa Saya Yang Menyebalkan: Catatan Tentang Kekuasaan Yang Pongah* yang ditulis Eep Saefuloh Fatah (Rosda Karya, 1998), *Republik Para Maling* yang ditulis Paulus Mujiran (*Pustaka Pelajar*, 2004), *Surga Para Koruptor* (Kumpulan Tulisan di *Kompas*, *Kompas*, 2004), *Kembalikan Indonesia* (Prabowo Subianto, *Sinar Harapan*, 2004), *Reformasi Birokrasi Amplop* (Dwiyanto Indiahono, *Gava Media*, 2006), *Pikiran Yang Terkorupsi* (Kwik Kian Gie, *Kompas* 2006), dan masih banyak yang lain sampai N.B Susilo menulis judul yang sangat provokatif, *Indonesia Bubar* (*Pinus Book*, 2006).

Semua buku tersebut menguraikan berbagai penyakit kronis masyarakat yang sangat sukar bahkan nyaris tidak bisa disembuhkan. Korupsi, misalnya, di satu sisi beberapa koruptor memang dipenjarakan dan lembaga yang menanganinya juga dibentuk dan terus bekerja dengan konsisten². Namun, di sisi lain praktik korupsi tetap saja berjalan ibarat kafilah yang terus berlalu meskipun anjing tidak henti menggonggong. Pada

² Eep Saefulloh Fatah dalam buku *Puisi Indah, Prosa Buruk, Evaluasi Dua Tahun Kebijakan Pemerintahan SBY-JK* (Jakarta: Simbiosia Rekatama Media, 2006, hal. Xix) misalnya, menyampaikan data bahwa Indonesia telah mengalami kemajuan dalam soal pemberantasan korupsi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

level masyarakat bawah juga beberapa pihak di kelas menengah dan atas situasi ini kemudian menyebabkan kerinduan untuk kembali pada masa lalu, masa ketika Soeharto memimpin. Buku-buku tentang Soeharto pun belakangan banyak ditulis. Salah satu yang menarik ditulis Dewi Ambar Sari berjudul *Seribu Alasan Rakyat Mencintai Soeharto (Jakarta Citra, 2006)*. Buku ini merangkum sekian banyak pendapat dari berbagai kalangan, mulai tukang becak, mahasiswa, sampai pengusaha yang kesemuanya menyatakan kerinduan pada kepemimpinan Soeharto.

Selanjutnya, situasi negeri ini diperparah oleh terjadinya berbagai bencana, baik yang diakibatkan oleh alam maupun ulah manusia: mulai dari tsunami Aceh, gempa Yogyakarta, tsunami Pantai Selatan Jawa Barat, meletusnya Gunung Merapi, lumpur Lapindo, sampai berbagai kecelakaan lalulintas (terperosok dan tabrakannya kereta api di darat, tenggelamnya KM Senopati dan terbakarnya KM Levina di laut, hilangnya pesawat Adam Air di udara, belakangan pesawat yang sama juga mengalami kecelakaan di Surabaya, serta banjir yang memporandakan Jakarta). Berbagai bencana alam yang memakan banyak korban manusia ini ditafsir berbagai pihak memiliki hubungan sebab-akibat dengan perilaku manusia itu sendiri.

Atas semua kejadian yang menimpa Indonesia dalam dasawarsa terakhir kiranya banyak hal yang tidak beres dalam pengelolaan bangsa dan negara ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Tulisan ini tidak hendak memberikan jawaban. Alih-alih memberi jawaban, melalui tulisan ini

saya hanya akan mengajak pembaca untuk secara singkat kembali menelusuri dan mengidentifikasi berbagai persoalan dalam bangsa dan negara ini sehingga dengan itu mudah-mudahan akan terbayang dalam benak kita tentang apa yang seharusnya dilakukan. Karena persoalan yang kita alami juga tidak bisa dilepaskan dari gejala yang terjadi ditingkat global, kaitannya dengan itu juga akan sedikit disinggung.

Kepulauan, Keberagaman Budaya, dan Pengelolaan yang Lemah

Situasi sosial-politik di Indonesia, baik yang positif maupun negatif, tidaklah bisa dilepaskan dari pengaruh berbagai gejala yang terjadi di tingkat global. Hanya, akibat pengaruh global tersebut memang ditentukan oleh citra diri dan identitas bangsa itu sendiri. Masing-masing bangsa dan negara di dunia sudah pasti memiliki citra diri dan identitas masing-masing sehingga akibat pengaruh global yang diterima setiap bangsa dan negara pun akan berbeda. Antara Indonesia dan negeri jiran Malaysia, misalnya, terdapat perbedaan yang mencolok dalam menyikapi berbagai skenario global, terutama yang dilancarkan Amerika³. Malaysia lebih selektif dan melakukan proteksi ke dalam, sedangkan Indonesia sangat

³ Jousairi Hasbullah, dalam bukunya, *Social Capital (Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia)*, (Jakarta: MR-United Press, hal. 65) mencatat bahwa antara Indonesia dan Malaysia sebenarnya memiliki kelemahan yang sama dalam soal mentalitas. Bedanya, Malaysia berani mengakui dan mengidentifikasi kelemahannya dan segera, melalui kebijakan Mahatir Mohammad, melakukan berbagai pembenahan. Sedangkan Indonesia lebih sering mengingkari kelemahan tersebut dan cenderung sering menyalahkan masa lalu, misalnya mengkambinghitamkan Belanda, Orde Lama, Orde Baru, dan seterusnya.

terbuka dan cenderung memperlihatkan ketergantungan, terutama dalam bidang ekonomi. Sebuah sikap yang sangat menunjukkan ketidakberdayaan Indonesia di hadapan Barat pernah secara visual diperlihatkan Soeharto di hadapan IMF pada 15 Januari 1998. Pada saat itu, Soeharto merunduk menandatangani surat patuh (*letter of intent*) di hadapan penguasa IMF yang berdiri dengan sikap angkuh.

Hal itu tentu saja merupakan sebuah ironi, bahkan tragedi. Indonesia adalah sebuah negeri kepulauan yang sangat luas dengan berbagai kekayaan alam yang sangat melimpah. Letak Indonesia yang melingkar sebagai zamrud khatulistiwa telah menjadikan negeri ini menjadi subur, tanahnya gembur tempat segala tanaman bisa tumbuh. Laut yang membentang luas, selat yang melintasi berbagai pulau adalah sumber kehidupan yang luar biasa. Denys Lombard mendeskripsikan luasnya wilayah Indonesia sebagai berikut:

“...luas wilayah Indonesia mencapai 1.900.000 km², atau sekitar lima puluh tujuh kali luas Belanda, lima kali luas Jepang, hampir empat kali luas Perancis, dua kali luas Pakistan, dan lebih dari separo luas India. Dari timur ke Barat, kepulauan Indonesia terbentang sejauh 5000 km, dari utara ke selatan sekitar 2000 km—sebuah wilayah yang cukup luas untuk dibagi menjadi tiga wilayah waktu, yang oleh orang Indonesia sendiri tak mudah dipahami. Bila diletakkan pada garis lintang yang lain, jarak yang memisahkan Aceh di ujung barat Indonesia dan Irian Jaya di

timur akan sama jauhnya dengan jarak dari Portugal ke Ural, atau dari Pantai Pasifik ke Pantai Atlantik di Amerika Serikat” (Lombard, 2005: 12).

Wilayah yang begitu luas dan terdiri atas 18.306 pulau besar-kecil (catatan LAPAN, 2002) yang dipisahkan selat dan laut itu menyebabkan negeri Indonesia juga memiliki keberagaman suku dan etnik. Menurut *Ensiklopedi Suku Bangsa Indonesia*, jumlah etnik di Indonesia mencapai 500 suku (Melalatoa, 1995). Warna kulit orang Indonesia pun beragam. Agraha Suhandi mencatat beberapa ciri ras manusia yang tersebar di Indonesia, antara lain Melayu (Melayu Tua dan Muda) yang tersebar di Sumatra, Kalimantan, Jawa, Madura, dan Bali, ras wedoid yang masih tampak pada suku bangsa Enggano, Kubu, Dayak Barito, Mentawai, Nias, dan lain-lain, dan ras negroid yang tersebar di pedalaman Papua (Suhandi, 1990: 40).

Semua potensi alam, masyarakat, dan budaya tersebut seharusnya menjadi modal bagi bangsa ini menuju pada kebesarannya. Akan tetapi, faktanya tidaklah demikian. Sebagaimana telah disinggung di atas, yang hari ini dipetik dari kekayaan itu adalah situasi sosial yang tidak menentu. Tentu banyak hal yang tidak benar dalam pengurusan bangsa ini. Dalam hal menyikapi keragaman budaya, misalnya, dalam orasi ilmiah pengukuhan guru besarnya di STSI Bandung (11/09/2003), Jakob Sumardjo berpendapat:

“Keberagaman budaya di Indonesia sudah dikenal oleh dunia. Tetapi kita sendiri sering

tidak menyadari keberagaman tersebut. Keberagaman hanya dilihat dari keseniannya yang terbawa dari masa lampunya ke masa kini. Kita belum sampai kepada kesadaran nenek moyang yang mengatakan: menarilah, maka saya akan tahu dari mana asalmu. Seni hanya kita lihat sebagai benda eksotis, bukan ungkapan filosofis budaya. Di balik benda seni tersebut termuat pola pikir yang mendasari budaya masyarakat penciptanya”.

Dari pendapat Jakob tersebut tercermin bahwa sikap bangsa Indonesia adalah pragmatis. Hal ini tentu saja merupakan masalah mentalitas. Imam Buchori, dalam seminar “Revitalisasi Pertanian dan Dialog Peradaban” di ITB (15/02/2007) mengatakan bahwa masalah kebudayaan bangsa Indonesia yang paling krusial adalah mentalitas yang lemah. Mochtar Lubis dalam bukunya *Manusia Indonesia, Sebuah Pertanggungjawaban* (1986) menyebutkan enam ciri utama masyarakat Indonesia, yakni hipokratis (munafik), tidak mau bertanggung jawab, feodalistik, percaya takhayul, artistik, dan berwatak lemah⁴. Dari enam ciri tersebut tampak hanya satu yang positif, yakni artistik.

Meskipun ciri-ciri manusia Indonesia yang dikemukakan Mochtar Lubis di atas masih bisa diperdebatkan dan diteliti lebih lanjut, secara umum

dan empirik, karakteristik tersebut dalam berbagai kadar memang bisa ditemukan. Secara sistematis, mentalitas itulah yang juga sangat berpengaruh pada sistem pengelolaan negara. Dari orde ke orde, pemerintahan Indonesia selalu tidak lepas dari korupsi, kolusi, nepotisme, manipulasi, dan lain-lain sejenisnya.

Mengamati fenomena itu, menjadi jamak jika kemudian wilayah Indonesia yang sangat luas ini tidak terurus dengan baik. Pembangunan tidak merata, yakni hanya terfokus ke Jawa, Bali, dan Madura. Wilayah-wilayah lain di luar Jawa umumnya hanya dijadikan sumber eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam yang hasilnya diangkut ke Jawa, terutama Jakarta. Sebagian pulau lain tidak terurus sama sekali, beberapa pulau bahkan lepas diambil oleh negara lain. Hubungan masyarakat antarpulau juga tidak terjalin dengan baik. Padahal, Lombard (2005: 12) mencatat bahwa pada 1888 Perusahaan Pelayaran Kerajaan Belanda (*Koninklijke Paketvaart Maatschappij/ K.P.M*) telah membuka jaringan pelayaran yang menghubungkan berbagai pulau. Pelayaran ini sangat teratur dan tepat waktu. Lombard menulis, “akan tercengang kita membaca jadwal perjalanan dalam buku panduan pariwisata tahun 30-an: Ambon, Ternate, Banda, dan semua kepulauan Sunda Kecil, bahkan Aru dan Tanimbar disinggahi seminggu atau dua minggu sekali”.

Pelayaran tersebut, sebagaimana disebutkan Lombard, memang diperuntukkan bagi kepentingan perdagangan dan pemerintahan Belanda. Namun, dengan pelayaran itu

⁴ Hasbullah, *ibid*, mencatat beberapa sifat manusia Indonesia, yakni cenderung menempuh jalan pintas, yang benar adalah kami, asing dengan perubahan, dan cenderung tidak rela orang lain mencapai prestasi yang lebih baik, tidak memiliki tradisi inovatif, lekas puas dengan hasil sederhana, dan cenderung boros.

hubungan pulau-pulau tersebut dengan Pulau Jawa terjalin dengan baik dan kontinyu. Ketika penjajahan Belanda selesai dan pada 1957 Indonesia menyita seluruh kekayaan Belanda yang sebagian besar dari KPM, tidak ada lagi pelayaran yang mengimbangi KPM. PELNI yang menggantikannya waktu itu tidak bisa menyamai pelayaran yang pernah dilakukan KPM. Pada 1968, ketika lalulintas antarpulau lebih banyak dilakukan melalui udara, hubungan antarpulau tersebut tidak mengalami kemajuan berarti. Lombard mencatat jadwal penerbagangan Garuda sebagai berikut:

“ waktu itu penerbangan setiap hari hanya dilakukan untuk jurusan Medan dan Palembang (pusat-pusat yang vital di Sumatra), Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Surabaya, dan Denpasar saja. Dari Medan hanya ada dua penerbangan dalam seminggu ke Aceh, satu ke Padang...; dari Makasar ada dua kali penerbangan ke Manado, dan hanya satu ke Ambon dan Irian; dari Denpasar, Bali, hanya ada satu kali penerbangan Dakota yang melayani Kepulauan Sunda Kecil seperti Lombok, Sumbawa, Flores, Sumba, dan Timor. Jadi, pada masa itu setiap hari hanya ada beberapa puluh penumpang yang dapat bepergian dari Jakarta ke pulau-pulau besar Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan sebaliknya” (Lombard, 2005: 13).

Saat ini keadaan memang sudah jauh berbeda. Sekian puluh bahkan ratus penerbangan telah dilakukan ke pulau-pulau besar tersebut. Akan tetapi, banyaknya penerbangan yang identik

dengan banyaknya jumlah orang yang berlalu-lalang itu tidak berbanding lurus dengan kualitas jaringan perhubungan antarpulau yang dibangunnya. Dalam beberapa hal, banyaknya penerbangan tersebut juga lebih identik dengan dibukanya peluang pada pemilik modal untuk berbisnis jasa angkutan udara. Masalahnya menjadi semakin kompleks karena kualitas penerbangan itu sendiri kian buruk. Sebagaimana telah disinggung di atas, dalam tahun-tahun terakhir ini kecelakaan pesawat juga kapal laut semakin sering terjadi. Beratus manusia telah menjadi korban karenanya.

Sebagai negara kepulauan, hubungan dan jaringan yang kuat antarpulau menjadi sebuah keharusan. Pemerintah yang berpusat di salah satu pulau (Jawa/Jakarta) mau tidak mau harus membagi perhatiannya ke seluruh wilayah kekuasaannya yang tersebar di berbagai pulau. Lautan dan selat yang mengantarai pulau-pulau itu harus disikapi sebagai pemersatu, bukan pemisah. Akan tetapi, di sinilah justru letak permasalahan Indonesia: pembangunan yang dilakukan sangat tidak berimbang antara pulau di pusat kekuasaan dan di dekatnya dengan pulau-pulau lain di luar itu. Pulau Jawa, dan terutama Jakarta, kemudian menjadi daerah yang dibanjiri para imigran dari berbagai pulau lain untuk mengadu nasib: menuntut ilmu, berbisnis, bekerja, mengejar karir kekuasaan, menjadi artis terkenal, merampok, sampai mengemis. Berbagai permasalahan pun kian hari kian kompleks dan menumpuk saja di Jakarta. Sementara itu, pulau-pulau di luar Jawa semakin tidak diperhatikan.

Tidak meratanya pembangunan yang diawali dari bidang ekonomi tersebut kemudian menyebar ke seluruh sektor kehidupan. Kehidupan masyarakat pun menjadi semakin centang-perenang. Akibatnya, Indonesia menjadi sebuah negara yang hidup dalam 21 abad sekaligus. Di pedalaman Papua, misalnya, masih banyak orang tertinggal dalam berbagai bidang. Kita sering menyebut mereka primitif atau masyarakat terbelakang. Sementara itu, di Jakarta atau di Jawa telah banyak orang yang dalam kesehariannya hidup dengan perangkat-perangkat teknologi canggih, berbahasa asing dalam keseharian, membaca buku-buku filsafat Barat, dan seterusnya. Bagi para peneliti kebudayaan dari Barat tentu kondisi ini sangat menggairahkan. Siswono Yudohusodo dalam seminar *Revitalisasi Pertanian dan Dialog Peradaban* (ITB, 15/02/2007), seraya mengutip teman Amerika-nya, berpendapat bahwa Indonesia adalah laboratorium antropologi terlengkap di dunia. Karena kenyataan demikian, sejarah peradaban Indonesia pun tidak linear seperti di Barat. Generalisasi yang sering dilakukan dalam penulisan sejarah dengan membuat periodisasi, misalnya, sebenarnya merupakan cermin dari mentalitas sejarawan yang hidup dan dibesarkan dalam kecentang-perenangan dan kesimpangsiuran sejarah itu sendiri.

Lebih jauh, kecentang-perenangan tersebut mengakibatkan bangsa ini sulit mengidentifikasi diri dalam sebuah identitas kebangsaan. Dalam bidang kebudayaan, misalnya, pemerintahan orde lama dan orde baru mengidentifikasi dan merumuskan

kebudayaan nasional sebagai puncak-puncak kebudayaan daerah. Rumusan ini sudah pasti aneh. Apa yang dimaksud puncak-puncak kebudayaan daerah itu? Siapa yang memiliki otoritas menentukan sebuah kebudayaan tertentu di sebuah daerah sebagai puncak? Bagaimana pula dengan kebudayaan yang tidak dianggap puncak? Apakah ia tidak dianggap budaya Indonesia sementara *de facto* hidup di Indonesia? Jawaban atas berbagai pertanyaan tersebut bisa dirangkum dalam satu kalimat, yakni definisi kebudayaan nasional sebagai puncak-puncak kebudayaan daerah adalah cermin dari ketidakberdayaan dan kebingungan pemerintah menghadapi wilayah budaya yang demikian luas dan beragam.

Kelokalan dan Guncangan Besar di Lingkup Global

Di atas telah disinggung bahwa situasi sosial, budaya, politik, ekonomi dan lain-lain dalam kehidupan masyarakat Indonesia tidak bisa lepas dari situasi yang berkembang pada tataran global. Selain faktor-faktor internal, antara lain soal mentalitas yang lemah dan kemampuan teknis yang minimal di satu sisi dan luasnya wilayah pada sisi yang lain sebagaimana telah diuraikan, gejala yang terjadi pada tingkat global sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat di republik ini. Pada bidang politik, misalnya, jatuhnya Soeharto pada 1998 tidak serta-merta diakibatkan oleh pemerintahan Soeharto itu sendiri yang semakin rapuh, tetapi juga karena desakan-desakan wacana di tingkat global. Isu-isu demokrasi dan hak asasi manusia

menjadi kekuatan yang tidak bisa ditangkal. Krisis moneter yang mempercepat jatuhnya Soeharto juga bukan masalah Indonesia saja, melainkan hampir semua negara di Asia Tenggara, juga Korea, mengalaminya.

Kemajuan sains dan teknologi, terutama teknologi informasi yang sangat pesat di tingkat dunia adalah bagian terpenting yang mempengaruhi seluruh sektor kehidupan masyarakat global. Dengan kemajuan teknologi informasi, batas-batas negara di dunia menjadi samar. Tidak ada lagi batas budaya, sementara batas politik pun kian menipis. Negara, sebagaimana disebutkan Benedict Anderson (2002), hanya menjadi sekumpulan manusia (komunitas) yang terbayang. Dunia pun menjadi menyempit, dan globalisasi adalah kata kuncinya. John Micklethwait dan Adrian Wooldridge membuat ilustrasi dari globalisasi dengan apa yang dilakukannya ketika menulis catatan pengantar untuk bukunya, *Masa Depan Sempurna: Tantangan dan Janji Globalisasi* (2007). Ia menulis catatan untuk pengantar bukunya itu di atas pesawat Amerika yang melintas antara Los Angeles dan New York. Pesawat yang ditumpanginya buatan Amerika dan laptop yang digunakan dibuat di Meksiko. Sementara itu, di punggung kursi pesawat ada *airfone* yang dapat menghubungkannya kemana dia suka. Ia juga bisa menghubungkan laptopnya pada *airfone* itu untuk masuk ke dunia maya (internet). Ia bisa membalas *e-mail* temannya dari Thailand sambil menonton *Leicester City* yang mengalahkan *Aston Villa* 3-1 pada pertandingan sepak bola Liga Utama

Inggris. Para pemain *Leicester City* itu sendiri berasal dari Perancis (penjaga gawang), Jamaika (pemain belakang), Yunani (pemain tengah), dan Islandia (penyerang). “Lihatlah sekeliling Anda, di mana pun Anda berada, Anda akan cepat menemukan bukti serupa bahwa dunia memang sedang jadi mengecil”, demikian Micklethwait menyimpulkan.

Dalam tingkat global, kemajuan teknologi informasi yang menjadi penggerak utama globalisasi tersebut membawa manusia memasuki abad informasi. Di Amerika, hal ini telah berlangsung sejak setengah abad lalu sebagaimana dikemukakan Francis Fukuyama sebagai berikut:

“Dalam setengah abad terakhir, Amerika Serikat dan negara-negara ekonomi maju lainnya secara berangsur-angsur beralih ke dalam apa yang dinamakan “masyarakat informasi”, “abad informasi”, atau “era pascaindustri.” Futuris Alvin Tofler menyebut transisi ini “Gelombang Ketiga”, yang menunjukkan bahwa gelombang ini pun akan membawa pengaruh yang sangat menentukan sebagaimana dengan dua gelombang sebelumnya dalam sejarah manusia: dari masyarakat pemburu-pengumpul menjadi masyarakat pertanian, kemudian dari masyarakat pertanian menjadi masyarakat industri” (Fukuyama, 2005: 1).

Fukuyama kemudian melihat berbagai perubahan pada masyarakat dalam abad informasi itu. Dalam sektor ekonomi, misalnya, lembaga jasa menempati posisi penting daripada sektor manufaktur. Orang lebih

memilih bekerja di bank, LSM, universitas, dan lembaga pelayanan masyarakat lain daripada di pabrik baja dan mobil. Kerja otak cenderung menggantikan kerja otot. Teknologi informasi yang kian murah memungkinkan orang lebih terbuka mengakses berbagai informasi: melalui telepon biasa dan seluler, faksimili, televisi, internet, dan lain-lain. Teknologi ini secara terus-menerus mengikis jarak dan batas-batas lain yang sebelumnya menjadi kendala dalam jaringan.

Masyarakat yang hidup berdasarkan informasi sedemikian, menurut Fukuyama, cenderung mencari dan menghasilkan dua hal yang dianggap bernilai dalam demokrasi modern, yakni *kebebasan dan kesetaraan*. Kebebasan memilih, baik yang menyangkut saluran televisi, pertemanan melalui internet, maupun pemilihan atas berbagai barang komoditas pun terus meningkat. Dalam situasi ini, berbagai aturan yang sifatnya hierarkis dan selalu memutuskan secara sepihak kian dipertanyakan. Fungsi negara melemah. Perusahaan-perusahaan besar dengan mekanisme kerja konvensional akan bangkrut jika tidak segera beradaptasi dan mengubah arah kebijakannya. Negara yang tidak mampu mengakomodasi dan mengendalikan pengetahuan warganya terancam berantakan. Contohnya adalah Uni Soviet dan Jerman Timur. "Kita sekarang hidup dalam dunia tanpa batas di mana negara bangsa hanya menjadi sebuah rekaan dan di mana para politikus telah kehilangan semua kekuatan efektif mereka",

demikian Keniche Ohmae dalam Giddens (2000: 33).

Sampai pada takaran tertentu situasi di atas berakibat positif. Akan tetapi, bersamaan dengan itu kondisi yang paradoks segera bisa diidentifikasi. Fukuyama mencatat bahwa di Amerika dan negara-negara industri besar lain terjadi degradasi moral yang cukup signifikan. Terjadi kemunduran dalam kehidupan sosial. Kejahatan meningkat, ikatan sosial dan kekeluargaan melemah, anak yang lahir di luar nikah meningkat (satu dari tiga bayi di Amerika Serikat dan hampir separuh anak di Skandinavia lahir tanpa ayah), dan kepercayaan pada berbagai lembaga resmi termasuk negara pun semakin menipis.

Plus-minus perubahan dan gejala yang terjadi akibat kemajuan pesat teknologi informasi tersebut secara dramatis berlangsung dalam kurun waktu kurang lebih setengah abad dan terjadi secara serentak di beberapa negara industri besar dalam periode sejarah yang sama. Fukuyama menyebut kondisi demikian sebagai *guncangan besar*. Pada kenyataannya, keadaan semacam ini memang mengguncang negara dan bangsa di seluruh dunia. Negara-negara ketiga yang sedang menata kehidupan sosial politiknya mau tidak mau juga ikut (dan harus) terlibat. Indonesia adalah salah satu di dalamnya.

Bagi Indonesia yang kehidupan masyarakatnya masih centang-perenang dan dalam dasawarsa terakhir malah terpuruk akibat kebijakan politik orde baru yang militeristik dan reformasi yang kehilangan kendali, globalisasi menunjukkan wujudnya yang menakutkan. Ketidaksiapan

dalam bidang ekonomi, misalnya, telah menyebabkan negeri ini menjadi sasaran (pasar) yang empuk bagi ekonomi global. Produk-produk dalam negeri semakin terpinggirkan. Pasar-pasar tradisional berubah wujud menjadi pasar modern. Proyek pembangunan pasar modern itu sendiri menjadi lahan empuk bagi para pemburu *tender*. Akibatnya, persaingan ekonomi menyebabkan rakyat kecil semakin menderita di tingkat mikro, sedangkan pada tingkat makro, ketimbang menjadi negara yang memantapkan dirinya dalam persaingan global, utang luar negeri malah kian meningkat.

Dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi keterdesakkan dan ketakberdayaan Indonesia juga sangat jelas. Nyaris tidak ada produk teknologi sendiri yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Barang-barang otomotif (baik roda dua maupun empat), telekomunikasi (terutama telepon genggam), komputer, sampai ke mainan anak-anak merupakan produk luar negeri. Secara akademis, Indonesia memiliki banyak sarjana lulusan luar negeri, tetapi sejauh ini mereka belum menunjukkan kualitas dirinya dalam kaitan dengan pencarian dan pembentukan identitas lokal, baik pada tataran konsep maupun praksis. Metodologi yang digunakan dalam penelitian berbagai potensi lokal sejauh ini umumnya masih tetap menggunakan metodologi asing. Bahkan pada bidang bahasa, bahasa Indonesia yang sudah sangat jelas merupakan bahasa sendiri (nasional) sering diformulasikan dalam rumusan-

rumusan menurut pola-pola linguistik bahasa asing.

Dalam bidang politik, isu-isu demokrasi di tingkat global telah mampu mengubah mekanisme demokrasi Indonesia. Hal yang paling mencolok tampak pada konsep pemilihan umum, baik legislatif maupun eksekutif. Pemilihan anggota legislatif dilaksanakan lebih transparan dengan peserta dari banyak partai, sementara pemilihan presiden dan kepala daerah dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Di samping itu, kekuasaan juga lebih terdistribusi dengan baik melalui konsep otonomi daerah. Namun demikian, pada tataran praksis konsep-konsep itu belum berjalan dengan baik. Dalam beberapa hal malah rentan terhadap berbagai kekacauan. Pendirian partai politik, misalnya, terkesan mudah dan asal-asalan sehingga jumlahnya menjamur dengan kriteria yang tidak jelas. Beberapa partai didirikan bahkan hanya untuk mendapatkan subsidi dari pemerintah. Selanjutnya, dominannya legislatif telah menyebabkan lembaga ini sering melakukan intervensi berlebihan pada kerja eksekutif. Pemilihan presiden dan kepala daerah secara langsung juga sering dimanfaatkan untuk *money politic* di level bawah (menyogok warga dengan membagikan sembako, misalnya). Pelaksanaan otonomi daerah juga menimbulkan berbagai persoalan yang kompleks. Munculnya raja-raja kecil di daerah adalah masalah yang paling krusial.

Demikianlah fenomena global tersebut sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Merujuk pada Fukuyama, globalisasi

betul-betul telah menjadi guncangan besar di negeri ini. Akibat guncangan tersebut, Indonesia seakan-akan menjadi sebuah kapal yang tidak memiliki keseimbangan. Nilai-nilai keindonesiaan seperti mengalami titik-balik kemunduran. Indonesia seakan kehilangan dirinya. Oleh sebab itu, Jakob Sumardjo, misalnya, memberi judul orasi ilmiah pengangkatan guru besarnya *Indonesia Mencari Dirinya* (2003).

Usaha-Usaha Ke Arah Pembentukan Jati Diri

Sebenarnya usaha-usaha ke arah pencarian dan pembentukan karakteristik diri juga terus dilakukan beberapa pihak meskipun jumlahnya tidak banyak. Budayawan, para pemikir, dan seniman seperti Jakob Sumardjo, Edi Sedyawati, Junus Melalatoa, Primadi Tabrani, Ajip Rosidi, Chaedar Alwasilah, Endo Suwanda, secara terus-menerus menguraikan dan menawarkan konsep-konsep yang berkaitan dengan hal tersebut. Jakob Sumardjo, misalnya, yang mengategorikan budaya Indonesia ke dalam empat jenis, yakni peramu, peladang, pesawah, dan pelaut sampai pada usulan agar pencarian jati diri dalam kebhinekaannya, bangsa Indonesia mengenali kembali *ibu* kebudayaan tersebut (Sumardjo, dalam orasi ilmiah *Indonesia Mencari Dirinya*, 2003: 19). Pada tingkat kelembagaan, LSM yang membidangi kearifan lokal juga banyak berdiri. Perguruan tinggi seni seperti FSRD ITB dalam beberapa tahun terakhir, melalui data penelitian yang ada di Perpustakaan FSRD, tampak lebih mengarahkan penelitian mahasiswanya

(terutama S2 dan S3) ke wilayah tradisi.

Kembali kepada *ibu* budaya sendiri atau pada kearifan lokal untuk membangun karakteristik keindonesiaan itu kemudian mendapat persambungan dengan paradigma posmodernisme, baik dalam ranah akademik maupun praksis (gerakan). Posmodernisme bisa disebut sebagai paradigma yang memberikan evaluasi dan kritik terhadap modernisme. Globalisasi sendiri secara faktual sebenarnya merupakan anak dari modernisme. Bambang Sugiharto menyebut globalisasi sebagai fosil dari konsep-konsep universalisasi, penyeragaman nilai yang tidak lain pengglobalan nilai-nilai peradaban dalam ukuran Barat. Pada tataran akademis dan wacana intelektual, posmodernisme adalah paradigma yang secara terus-menerus mempertanyakan konsep-konsep dan nilai-nilai peradaban semacam itu. Adapun pada tingkat praksis, posmodernisme membuka ruang-ruang bagi cairnya berbagai kategori tinggi-rendah, baik-buruk, Barat-Timur, dan seterusnya. Untuk mengkritik tatanan global yang kapitalistik, posmodernisme memberikan peluang kepada kekuatan-kekuatan kecil (*micro power*) untuk bangkit dan menunjukkan kemandiriannya. Potensi-potensi lokal di berbagai pelosok dunia, terutama di wilayah bangsa-bangsa yang terpinggirkan modernisme adalah “mitra kerja” posmodernisme.

Walhasil, potensi-potensi lokal Indonesia kini tengah mendapat peluang untuk menunjukkan kemandiriannya di tingkat global. Sudah pasti hal itu tidak mudah. Jika tidak dilakukan studi yang intens dan

pengelolaan yang serius, peluang tersebut hanya akan berhenti sebagai peluang. *De facto*, sampai hari ini kondisi Indonesia masih pada situasi tarik-menarik antara tradisi dan modernitas, kelokalan versus keglobalan, kelisanan versus keberaksaraan, dan seterusnya. Tarikan keluar semakin keras, sementara pembenahan diri ke dalam masih mendapat berbagai kendala yang kompleks. Tarik-menarik itu berlangsung kurang seimbang. Citra diri bangsa ini akan semakin *terbetot* ke medan pertempuran yang kian keras dan kita hanya tinggal menunggu kehancurannya jika taksegera mempelajari jurus-jurus bertahan dengan kuda-kuda yang memaku ke bumi sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Althusser, Louis. 2004. *Tentang Ideologi: Marxisme Strukturalis, Psikoanalisis, Cultural Studies*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Andersen, Benedict. 2002 (cet.ke-2). *Imagined Communities: Komunitas-Komunitas Terbayang*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Ayatrohaedi (penyunting). 1986. *Kepribadian Jiwa Bangsa*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Christomy, Tommy. 2002. *Indonesia: Tanda Yang Retak*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Dewanto, Nirwan. 1996. *Senjakala Kebudayaan*. Yogyakarta: Bentang.
- Dharmawan, HCB. 2004. *Surga Para Koruptor*. Jakarta: Kompas.
- Fatah, Eef Saefulloh. 2006. *Puisi Indah, Prosa Buruk: Evaluasi Dua Tahun Kebijakan Pemerintahan SBY-JK*. Jakarta: Symbiosa Rekatama Media.
- Fukuyama, Francis. 2005. *Guncangan Besar: Kodrat Manusia dan Tata Sosial Baru*. Jakarta: Gramedia.
- Giddens, Anthony. 1994. *Living A Post-Traditional Society*. Polity Press, Cambridge.
- Hasbullah, Jousairi. 2006. *Social Capital (Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia)*. Jakarta: MR-United Press Jakarta.
- Kristanto, J.B (Editor). 2000. *Seribu Tahun Nusantara*. Jakarta: Kompas
- Kuntowijoyo. 1999. *Budaya dan Masyarakat*. Cet.ke-2. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Lombard, Denys. 2005. *Nusa Jawa: Silang Budaya, Batas-Batas Pembaratan*, Jilid 1. Jakarta: Gramedia
- Lubis, Mochtar. 1986 (cet.ke-7). *Manusia Indonesia: Sebuah Pertanggungjawaban*. Jakarta: Idayu Press.
- Micklethwait, John & Wooldridge, Adrian. 2007. *Masa Depan Sempurna: Tantangan dan Janji Globalisasi*. Jakarta: Yayasan Obor
- Ohmae, Kenichi. 2002. *Hancurnya Negara Bangsa: Bangkitnya Negara Kawasan dan Geliat Ekonomi Regional di Dunia Tak Berbatas*. Yogyakarta: Qalam
- Steger, Manfred B. 2002. *Globalisme: Bangkitnya Ideologi Pasar*. Yogyakarta: Lafadl Pustaka.

- Sumardjo, Jakob. 2000. 2003.
Indonesia Mencari Dirinya.
Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru
Besar di STSI BAndung, 11
September 2003.
- Suseno, Franz Magnis. 2006. *Berebut
Jiwa Bangsa.* Jakarta: Kompas.
- Sutrisno, Mudji. 2006. *Oase Estetis:
Estetika dalam Kata dan Sketza.*
Yogyakarta: Kanisius.
- Teeuw, A. 1994. *Indonesia Antara
Kelisanan dan Keberaksaraan.*
Jakarta: Pustaka Jaya